

## INTISARI

### **PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UPAH YANG ADIL BAGI JURU PARKIR RESMI ATAS PENERAPAN DIGITALISASI PEMBAYARAN PARKIR QRIS DI ZONA TEPI JALAN UMUM KOTA SURABAYA**

**Oleh:**

**Nur Wisam Muhammad<sup>1</sup>, Ari Hernawan<sup>2</sup>**

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara juru parkir resmi dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya serta mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pelindungan hukum terhadap hak upah yang adil bagi pekerja juru parkir resmi atas penerapan digitalisasi pembayaran parkir QRIS di Zona TJU Kota Surabaya.

Penulisan hukum ini merupakan penelitian yuridis-empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian yuridis dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder atas berbagai bahan hukum baik primer maupun sekunder dengan alat berupa studi dokumen. Penelitian empiris dilakukan melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada subjek penelitian selaku responden dan narasumber dengan alat berupa pedoman wawancara yang bersifat terbuka. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan: Pertama, hubungan hukum antara juru parkir resmi dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya terdapat 2 (dua) jenis yakni hubungan kerja dan kemitraan. Kedua, pelaksanaan pelindungan hak upah yang adil bagi pekerja juru parkir resmi mitra kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan parkir QRIS telah terlindungi, mengingat Dinas Perhubungan Kota Surabaya justru telah memberikan kenaikan pada persentase bagi hasil dari perolehan retribusi jasa parkir.

**Kata Kunci :** Hubungan Hukum, Pelindungan Hak, Juru Parkir Resmi

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Strata Satu (S-1) Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>2</sup> Dosen Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## **ABSTRACT**

### ***LEGAL PROTECTION TO OFFICIAL PARKING ATTENDANTS DUE TO THE IMPLEMENTATION OF DIGITALISATION ON QRIS PARKING PAYMENT IN PUBLIC ROADSIDE AREAS IN SURABAYA***

***By:***

**Nur Wisam Muhammad<sup>1</sup>, Ari Hernawan<sup>2</sup>**

*This legal writing aims to find out and analyse the legal relationship between official parking attendants and the Surabaya City Transportation Agency and to find out and analyse the implementation of legal protection of fair wage rights for official parking attendant workers over the implementation of digitalisation of QRIS parking payments in the TJU Zone of Surabaya City.*

*This legal writing is a descriptive juridical-empirical research. Juridical research is conducted through literature studies to obtain secondary data on various legal materials both primary and secondary with tools in the form of document studies. Empirical research is conducted through field research by conducting interviews with research subjects as respondents and sources with tools in the form of open-ended interview guidelines. The research data was analysed qualitatively.*

*The research results concluded: First, there are 2 (two) types of legal relationship between official parking attendants and Surabaya City Transportation Agency, namely work relationship and partnership. Second, the implementation of the protection of fair wage rights for workers of official parking attendants in related to the implementation of the QRIS parking policy has been protected, considering that the Surabaya City Transportation Agency has actually given an increase in the percentage of profit sharing from the acquisition of parking service retribution.*

***Keywords:*** Legal Relationship, Legal Protection, Official Parking Attendants

---

<sup>1</sup> Undergraduate Student of the Civil Law Department at the Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

<sup>2</sup> Lecturer of Civil Law Department at the Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.